

ABSTRAK

Hal yang menarik untuk dikaji didalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm adalah alasan-alasan majelis hakim yang kemudian menjadi dasar pertimbangan yang menyebabkan dijatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dibawah batas minimum dan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menanggapi banding dari Penuntut Umum terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara tindak pidana narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) kualifikasi sebuah tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (2) dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, (3) putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. (2) putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Bjm telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan segala pertimbangan hukumnya, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari materi tuntutan pidana Penuntut Umum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. (3) Dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, pencapaian aspek keadilan yang berusaha untuk dicapai dengan menganalisa unsur dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan pertimbangan doctrinal sebagai dasar penolakan banding dari Penuntut Umum dan memperbarui amar putusan yang lebih adil bagi terdakwa maupun masyarakat.

Kata Kunci : Judex Facti, Banding, Tindak Pidana Narkoba.

ABSTRACT

An interesting thing to study in Decision Number 89 / Pid.Sus / 2019 / PT.Bjm is the reasons for the panel of judges which later became the basis for consideration that led to the imprisonment imposed on the Defendant below the minimum limit and as a consideration for the judges of the Banjarmasin High Court in response appeal from the public prosecutor against the decision at the court of first instance in the narcotics crime case.

*This study aims to examine and analyze: (1) the qualifications of a narcotics crime based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, (2) the basis for the consideration of High Court judges as a *judex facti* against the appeal of the public prosecutor in decision No.89 / Pid. Sus / 2019 / PT.Bjm, (3) decision No.89 / Pid.Sus / 2019 / PT.Bjm which was handed down to the accused of narcotics crime has fulfilled a sense of justice.*

The approach method used in this research is sociological juridical. This research specification is descriptive analytical. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it can be concluded that: (1) The criminal provisions contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is formulated in Chapter XV of the Criminal Provisions Article 111 to Article 148. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, there are four categorizations of illegal actions that are prohibited by law and can be punished with criminal sanctions. (2) the decision of the Banjarmasin District Court Number 138 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bjm has been considered by the Panel of Judges at the first level appropriately and correctly based on the facts revealed in court with all its legal considerations, while the appeal memory from the Public Prosecutor is only a repetition of the material for the criminal charges of the Public Prosecutor which has been considered by the Panel of Judges at the first level. (3) In the consideration of the panel of judges in decision No.89 / Pid.Sus / 2019 / PT.Bjm, the attainment of the aspect of justice that is attempted to be achieved by analyzing the elements of narcotics crime committed by the defendant and doctrinal considerations as the basis for rejection of the appeal from the Prosecutor General and renewing a ruling that is fairer for both the accused and the public.

Keywords : *Judex Facti, Appeal, Narcotics Crime.*